

BAB V

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI

5.1 Simpulan

Peneliti dalam menyimpulkan hasil penelitian, mengklasifikasikan simpulan ke dalam dua bentuk, yaitu simpulan umum dan simpulan khusus. Simpulan umum yaitu generalisasi yang menaungi hal-hal yang bersifat khusus. Simpulan umum mencakup seluruh pembahasan, termasuk orientasi penelitian yang diejawantahkan dalam rumusan masalah, sedangkan simpulan khusus hanya mencukup pada tiap rumusan masalah.

5.1.1 Simpulan Umum

Sistem politik demokrasi merupakan sistem politik yang memberi kebebasan berekspresi dan menghendaki adanya partisipasi dari setiap masyarakat demi menghidupkan proses demokrasi. Partisipasi masyarakat yang tinggi merepresentasikan masyarakat mengerti serta memiliki antusiasme sehingga ingin terlibat ke dalam kegiatan politik, seperti pemilihan umum (pemilu). Sedangkan, rendahnya partisipasi dari masyarakat dapat diartikan masyarakat tidak mengerti dan memiliki antusiasme yang kurang untuk melibatkan diri ke dalam pemilu. Hal tersebut menunjukkan bahwa demokrasi memberi hak yang sama bagi setiap warga masyarakat.

Seperti halnya keikutsertaan selebritis dalam kontestasi politik seperti pilkada, karena menjadi wahana yang tepat untuk mengekspresikan orientasi politiknya, dan menandakan predisposisi terjadi dalam struktur sosial dan politik, dari miniatur politik, menjadi aktor politik, bahkan meraih tempat karena popularitasnya. Faktor popularitas membuat keikutsertaan selebritis dalam kontestasi politik telah merubah realisasi demokrasi menjadi semu, karena telah mendominasi kesadaran dalam masyarakat, yang menjadi preferensi utama dalam berpartisipasi menentukan pilihan politik, namun justru mengabaikan aspek program dan gagasan seorang kandidat politik, sehingga menegaskan budaya politik suatu bangsa.

5.1.2 Simpulan Khusus

- 1) Upaya *public figure* dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat Kabupaten Indramayu ialah dengan menggunakan popularitas keselebritisannya karena menjadi daya tarik bagi masyarakat, khususnya kaum hawa baik yang masih pemilih pemula maupun dewasa. Selain itu, faktor popularitas menjadikannya selangkah lebih maju dibandingkan dengan calon-calon lain di luar *public figure*. Popularitas yang digunakan rupanya efektif karena telah menghasilkan transaksi psikologis, yang mana masyarakat karena ketertarikannya dan *public figure* yang memanfaatkan popularitas tersebut untuk menjaring suara masyarakat, bahkan adanya regulasi kampanye yang menjadi hambatan dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat tidak begitu berarti, karena disadari ataupun tidak disadari, faktor popularitas telah menjadi perangsang politik bagi masyarakat untuk merealisasikan partisipasi politiknya, karena adanya kontak pribadi yang dihasilkan dari interaksi antara *public figure* dan masyarakat melalui sarana organisasi maupun melalui sarana media massa, didukung dengan perkembangan media massa yang semakin canggih, seperti *Instagram* yang digunakan sebagai sarana kampanye politik.
- 2) Praksis pilkada sebagai wahana diskursus politik masyarakat Kabupaten Indramayu, merupakan wahana yang mengakomodir masyarakat untuk mengekspresikan orientasi politiknya, baik pada hak memilih, sosialisasi pemilu, maupun kritik pilkada. Media sosial berperan penting dalam merealisasikan diskursus politik, karena karakteristik khusus yang dimiliki media sosial sebagai bentuk modernisasi yaitu adanya informasi yang dapat menjangkau secara luas, dan menunjukkan bahwa media sosial menjadi wahana diskursus politik yang bersifat baru bagi masyarakat untuk memperoleh informasi politik secara komprehensif mengenai kandidat politik, sehingga diskursus politik bertujuan pada pencerdasan masyarakat. Hal ini juga didukung oleh Blommaert (2019: hlm. 1) memaparkan media sosial merupakan wahana diskursus yang bersifat baru dan alternatif, pada media sosial tersebut terdapat wacana, isu, orientasi politik masyarakat yang sifatnya komunikatif. Namun untuk melakukan komunikasi sangat

dibutuhkan informasi secara komprehensif, kurangnya informasi politik yang diperoleh masyarakat mengenai kandidat politik, mengakibatkan kecerdasan politik masyarakat dalam berpartisipasi menentukan pilihan politik semakin sulit berkembang dan hanya dibelenggu budaya politik parokial. Dengan demikian, diskursus politik menjadi strategi yang efektif guna memperkuat kehidupan berdemokrasi suatu bangsa pada kontestasi politik, karena diskursus politik melayani dan melindungi tujuan masyarakat, karena tujuan tersebut pada umumnya bersifat material.

- 3) Eksistensi *public figure* dan dampaknya terhadap *pseudo democracy* masyarakat Kabupaten Indramayu, akibat belum cerdasnya masyarakat dalam berpartisipasi pada kontestasi politik, karena faktor popularitas keselebritisan begitu mendominasi sarana produksi intelektual, di saat yang sama telah menentukan kesadaran dalam masyarakat, dan menggiring opini suara publik. Mengakibatkan masyarakat dalam berpartisipasi menentukan pilihan politik hanya terbatas pada aspek popularitas namun mengabaikan aspek kapasitas, karena kuatnya faktor popularitas yang telah mendominasi kecerdasan politik masyarakat yang terkait begitu riskan dengan budaya politik parokial. Sehingga kehidupan berdemokrasi suatu bangsa belum berkualitas, karena menandakan *pseudo democracy* terjadi dalam struktur sosial dan politik masyarakat, yang merepresentasikan realisasi reformasi selaku hak masyarakat yang menuntut hadirnya kehidupan berdemokrasi dalam struktur sosial dan politik suatu bangsa tidak berjalan secara efektif, berdampak pada praksis pilkada yang belum mengarah pada pencerdasan masyarakat, tetapi sebatas objek yang perlu dimanfaatkan suaranya demi meraih kemenangan. Dengan demikian, *pseudo democracy* ditandai sebagai aktivitas sosial dan politik masyarakat yang seolah berdemokrasi, tetapi pada praktisnya tidak berdemokrasi, karena tidak berdasar pada kaidah atau ciri khas demokrasi.

5.2 Implikasi dan Rekomendasi

5.2.1 Institusi Formal dan Non Formal

1. Penanggung jawab utama dalam upaya mewujudkan kesejahteraan umum, menjadi tanggung jawab institusi formal untuk merumuskan kebijakan yang berorientasi pada penyelesaian masalah pendidikan politik di masyarakat secara efektif.
2. Program institusi formal seyogyanya berfokus pada penguatan jadi diri warga masyarakat yang berkarakter, merevitalisasi program pendidikan politik bagi masyarakat agar cerdas dalam berdemokrasi, partisipatif, juga berdaya, yang ditopang dengan pondasi kecerdasan politik yang kuat.
3. Pada basisnya partisipasi institusi nonformal bersifat sukarela, maka fokus institusi nonformal tidak hanya berfokus pada pemenangan paslon, melainkan juga bersinergi dengan institusi formal dalam penguatan jadi diri warga masyarakat yang berkarakter, merevitalisasi program pendidikan politik bagi masyarakat agar cerdas dalam berdemokrasi, partisipatif, juga berdaya.

5.2.2 Perguruan Tinggi

1. Perguruan tinggi dapat berperan lebih mendalam yaitu dengan memberikan pemikiran mengenai partisipasi politik, diskursus politik, juga demokarsi, dengan tujuan memperkaya khazanah pengetahuan bagi komunitas akademik bahkan masyarakat.
2. Perguruan tinggi, merupakan wahana akademik, sehingga tepat untuk mengeskspresikan pemikiran mengenai keilmuan, yang mana keilmuan itu dapat bermanfaat bagi mahasiswa khususnya, serta masyarakat pada umumnya untuk menganalisis dan merefleksikan realitas sosial, untuk mengetahui sejauh mana distorsi antara teori dan kenyataan di masyarakat, sehingga mampu menyusun strategi serta upaya untuk mendekatkan teori dan realitas di masyarakat.

5.2.3 Dosen

1. Dosen Pendidikan Kewarganegaraan dapat merancang, melaksanakan, juga mengevaluasi materi PKN dalam konteks pengembangan kecerdasan kewarganegaraan (*civic intelligent*), pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), karakter kewarganegaraan (*civic disposition*), keterampilan

kewarganegaraan (*civic skill*) komitmen kewarganegaraan (*civic commitment*), keteguhan kewarganegaraan (*civic confidence*), untuk dapat memancar dari dan mengkristal kembali menjadi kebajikan kewarganegaraan (*civic virtues*), agar membentuk partisipasi kewarganegaraan (*civic participation*) pada mahasiswa secara cerdas sebagai bentuk dari tanggung jawab warga negara (*civic responsibility*).

5.2.4 Mahasiswa

1. Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan perlu memiliki partisipasi kewarganegaraan (*civic participation*) secara cerdas (*civic intelligent*), karena mahasiswa merupakan representasi dari masyarakat yang memposisikan diri sebagai *influencer millennial* berbasis keilmuan yang berperan aktif dalam memberikan masukan, juga seruan pada hal yang seharusnya terjadi dan tidak seharusnya terjadi.

5.2.5 Masyarakat

1. Pengamalan hak dan kewajiban masyarakat dapat dengan aktif berpartisipasi mengekspresikan orientasi politik dalam kontestasi politik. Masyarakat kokoh jika masyarakat tersebut memiliki pondasi kecerdasan (melek politik) yang kuat, mengutamakan kepentingan umum, dalam menghadapi predisposisi politik yang semakin kuat.

5.2.6 Peneliti Selanjutnya

1. Karena penelitian ini hanya difokuskan pada satu lokasi penelitian, yang menunjukkan hasil penelitian bahwa keikutsertaan selebritis sebagai seorang *public figure* pada kontestasi politik selain berpotensi meningkatkan partisipasi masyarakat karena popularitas yang dimiliki menjadi perangsang bagi masyarakat untuk merealisasikan partisipasi politiknya, tetapi realisasi demokrasi menjadi semu karena faktor popularitas telah mendominasi kesadaran dalam masyarakat, mengakibatkan kecerdasan politik masyarakat sulit berkembang, sebab tidak berdasar pada kapasitas tetapi kepada popularitas. Maka diharapkan bagi peneliti selanjutnya dapat berfokus secara mengkomparasikan dengan keikutsertaan *public figure* selebritis pada kontestasi politik dengan lokasi penelitian yang berbeda.